



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## UPAYA BANK INDONESIA DALAM MENJAGA STABILITAS RUPIAH

**Deniza Mulia Nita**

Analisis Legislatif Ahli Pertama

[deniza.nita@dpr.go.id](mailto:deniza.nita@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menunjukkan pelemahan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Data menunjukkan rupiah sempat menyentuh level Rp16.775 per dolar AS, bahkan nyaris menembus Rp16.800. Kondisi ini langsung menjadi sorotan publik dan pasar, mengingat stabilitas rupiah bukan hanya persoalan nilai mata uang, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan investor, daya beli masyarakat, serta ketahanan ekonomi nasional. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menegaskan bahwa otoritas moneter telah mengerahkan seluruh instrumen stabilisasi, mulai dari intervensi di pasar valas, pengelolaan likuiditas rupiah, hingga kebijakan suku bunga.

Pelemahan rupiah kali ini tidak dapat dilepaskan dari faktor eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, penguatan dolar AS menjadi faktor utama. The Federal Reserve masih mempertahankan suku bunga tinggi dalam waktu lama, sehingga aliran modal global cenderung kembali ke aset dolar yang dianggap lebih aman. Kondisi geopolitik yang masih bergejolak di beberapa kawasan juga memperkuat tren *"flight to safety"*, di mana investor global menempatkan dananya ke instrumen berbasis dolar. Sementara itu, dari sisi internal, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi oleh kebutuhan impor yang masih tinggi dan tekanan pada neraca perdagangan akibat fluktuasi harga komoditas.

Persoalan yang muncul kemudian adalah seberapa efektif langkah-langkah stabilisasi BI dalam menjaga kurs rupiah. Otoritas moneter memang memiliki instrumen, baik intervensi langsung maupun melalui kebijakan suku bunga acuan. Namun, efektivitas intervensi di pasar valas bersifat jangka pendek. Ketika faktor eksternal mendominasi, intervensi hanya mampu menahan pelemahan dalam waktu yang terbatas. Kebijakan kenaikan suku bunga berisiko memperlambat sektor riil, terutama dunia usaha dan kredit konsumsi. Di sinilah dilema kebijakan moneter muncul yakni menjaga stabilitas rupiah tanpa menekan pertumbuhan ekonomi.

Dari perspektif kebijakan publik, pelemahan rupiah ini seharusnya menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal. Peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menjaga fundamental ekonomi sama pentingnya dengan langkah BI. Misalnya, menjaga defisit anggaran pada level yang kredibel, memperluas basis penerimaan negara, serta mengendalikan belanja agar tetap produktif. Selain itu, strategi jangka panjang dalam mengurangi ketergantungan impor, terutama energi dan pangan, juga perlu dipercepat. Tanpa penguatan fundamental ini, setiap guncangan eksternal akan terus menekan rupiah.

Dampak pelemahan rupiah tidak boleh diremehkan. Bagi masyarakat, pelemahan kurs akan berdampak pada kenaikan harga barang impor, dari bahan baku industri hingga produk konsumsi. Jika tekanan ini berlanjut, inflasi bisa meningkat dan daya beli masyarakat melemah. Bagi dunia usaha, terutama sektor yang bergantung pada bahan baku impor, biaya produksi otomatis naik. Hal ini bisa mengurangi daya saing industri nasional. Investor asing juga akan lebih berhati-hati menempatkan dananya di Indonesia bila volatilitas rupiah terus berlanjut.

Fenomena ini menunjukkan bahwa stabilitas rupiah bukan semata tugas BI, melainkan juga memerlukan dukungan kebijakan menyeluruh. Pemerintah perlu memberi sinyal kuat melalui reformasi struktural, peningkatan produktivitas, dan kebijakan fiskal yang disiplin. Sementara BI, dengan keterbatasan ruang gerak, harus tetap menjaga keseimbangan antara stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi. Jika koordinasi kedua pihak lemah, pelemahan rupiah bisa menjadi gejala berulang yang terus membebani perekonomian nasional.

Dengan demikian, permasalahan utama yang mengemuka adalah bagaimana Indonesia mampu menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan eksternal yang kuat dan keterbatasan instrumen domestik. Tantangannya adalah memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya reaktif, tetapi juga mampu membangun fondasi yang lebih tahan terhadap guncangan global.

## Atensi DPR

Dalam upaya menjaga stabilitas rupiah, DPR RI khususnya Komisi XI harus mendorong penyusunan regulasi yang memperkuat stabilitas sistem keuangan, termasuk pengaturan terkait manajemen devisa dan pengendalian aliran modal jangka pendek. DPR RI juga perlu memperketat pengawasan terhadap kebijakan BI dan Kemenkeu, memastikan bahwa langkah stabilisasi kurs tidak hanya bersifat reaktif tetapi terintegrasi dengan kebijakan fiskal yang disiplin. Pemerintah bersama DPR RI juga harus memastikan postur APBN tetap kredibel dengan defisit terjaga, sekaligus mendorong belanja negara diarahkan pada sektor produktif yang mampu mengurangi ketergantungan impor. Dengan demikian, koordinasi kebijakan yang komprehensif dapat dilakukan oleh semua pihak yang terkait demi menjaga stabilitas rupiah serta kepercayaan pasar.

## Sumber

antaranews.com, 26 September 2025;  
cnbcindonesia.com, 26 September 2025;  
detik.com, 26 September 2025; dan  
rri.co.id, 26 September 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Edmira Rivani  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Firyal Nabihah.  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikhah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*